

PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM PENGENDALIAN INTERN, PEMAHAMAN BASIS AKRUAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH

Ida Ayu Enny Kiranayanti¹
Ni Made Adi Erawati²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail: idaayuennyk@yahoo.com/ telp: +62 85 737 421 006

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan pemahaman atas regulasi sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Badung. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Kuisioner disampaikan kepada 108 pegawai SKPD Kabupaten badung yang bekerja di bagian akuntansi/keuangan, sebanyak 108 kuisioner (100%) kembali diisi dengan lengkap dan dapat diolah. Data yang dikumpulkan diolah dengan menggunakan program *software* SPSS. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan pemahaman atas regulasi sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci: Kualitas Laporan Keuangan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Atas Regulasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the competence of human resources, internal control systems and an understanding of the regulation of government accounting system based akrual terhadap quality of local government financial reports Badung. The approach used in this study is the quantitative approach. Data used in this study are primary data and secondary data. Questionnaire submitted to the 108 employees of the District SKPD delinquent who works in accounting / finance, as many as 108 questionnaires (100%) again filled with lengkap and can be processed. The data collected were processed using SPSS software program. The statistical method used to test the hypothesis is multiple linear regression analysis. The results showed that the competence of human resources, internal control systems, and an understanding of the regulation of accrual-based accounting system of government has a positive and significant impact on the quality of local government financial reports.

Keywords: *Quality of Financial Reports, Competence Human Resources, Internal Control Systems, Understanding Upper Regulation Accrual Based Government Accounting System*

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan Akuntansi *Sektor* Publik di Indonesia, maka wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan yang umum. Menguatnya tuntutan tersebut mengharuskan lembaga pemerintah memberikan informasi atas aktivitas dan kinerjanya kepada publik (Soimah, 2014). Organisasi sektor publik yang sering dihubungkan dengan pemerintah yang bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan publik untuk memenuhi kesejahteraan di berbagai bidang kehidupan. Pemerintah merupakan entitas publik yang harus mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam bentuk laporan keuangan. Pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif dan transparan (Hariyanto, 2012). Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan (Yosefrinaldi, 2013).

Fenomena kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Dasar pemikiran ini berasal dari fakta bahwa terdapat penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah.

Seperti tulisan dalam temuan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2008 dimana BPK RI memberikan opini “Tidak Memberikan Pendapat”, pada tahun 2013 BPK RI member opini “Tidak Wajar” atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung. Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia adalah menguatnya tuntutan atas kualitas laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Nurillah, 2014). Karakteristik kualitatif yang disyaratkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yakni relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai (Nurillah, 2014). Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan andal. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan (Husna, 2013).

Penyusunan Laporan Keuangan yang berkualitas membutuhkan SDM yang kompeten dan memahami aturan penyusunan laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan. Menurut Ihsanti (2014) kompetensi SDM adalah

kemampuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. SDM merupakan faktor penting demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Dalam hal ini adanya kompetensi SDM mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya memiliki peranan yang sangat penting untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan entitas yang bersangkutan (Wati dkk, 2014).

Tingginya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga ditentukan oleh seberapa baik pengendalian internal yang dimiliki institusi pemerintah daerah. Pengendalian intern yang lemah menyebabkan sulitnya mendeteksi kecurangan/ketidakkuratan proses akuntansi sehingga bukti audit yang diperoleh dari data akuntansi menjadi tidak kompeten (Winidyaningrum, 2009). Pemilihan ini dilakukan di Pemerintahan Daerah Kabupaten Badung di karenakan pada tahun 2008 BPK RI memberikan opini “Tidak memberikan pendapat”, pada tahun 2013 BPK RI memberikan opini “Tidak Wajar”. Selanjutnya pada Tahun 2014 BPK RI memberikan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” dalam menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah. Meskipun opini yang diberikan BPK tersebut baik pada Pemerintah Kabupaten Badung, namun dari pelaksanaan pemeriksaan di lapangan, BPK masih menemukan beberapa kelemahan dalam sistem pengendalian interim dan temuan yang terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Seperti diketahui, opini merupakan keluaran dari sebuah proses pemeriksaan laporan keuangan. Opini BPK merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk mendapatkan tingkat kepercayaan atas

sebuah laporan keuangan yang disajikan. Pemilihan Kabupaten Badung ini karena Kabupaten Badung sumbang pertumbuhan ekonomi Bali terbesar dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung yang mencapai 7,3 dalam tahun 2012 disertai dengan distribusi pendapatan dengan pemerataan yang tinggi, terjadinya penurunan tingkat kemiskinan yang cukup signifikan dengan angka mencapai 2,10 dalam tahun 2013 serta terjadinya peningkatan belanja APBD dalam tahun 2014 ini tembus 3,2 T sebagai akibat meningkatnya pendapatan asli daerah yang bersumber dari pendapatan atas Pajak dan restoran sehingga hal ini juga berimplikasi terhadap peningkatan besarnya bantuan keuangan kepada provinsi dan enam kabupaten se-bali yang dalam tahun 2013 mencapai 195 Milyar lebih semntara dalam tahun 2014 di anggaran induk ini mencapai 187 M lebih. melalui peningkatan belanja ini maka pemerintah Kabupaten Badung juga dapat meningkatkan besarnya anggaran pada berbagai bidang dan sektor termasuk pada pembangunan di sektor pertanian terutama melalui pembangunan petani mandiri dan sejahtera (TANIMAS) dengan anggaran dalam tahun 2014 ini sebesar 4,3 Milyar lebih.

Dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung tersebut di atas, BPK mempertimbangkan sistem pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Badung untuk menentukan prosedur pemeriksaan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan dan tidak ditujukan untuk memberikan keyakinan atas sistem pengendalian intern. BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan operasinya. Pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Badung yang ditemukan BPK adalah Pengelolaan Dana BOS Reguler yang Bersumber dari Pemerintah Pusat Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan, Proses Validasi Data Piutang PBB P2 Belum Selesai Seluruhnya, Pengelolaan Uang Retribusi Tidak Sesuai Ketentuan dan Tanah Fasilitas Sosial yang Diserahkan Pengembang Belum Tercatat di Neraca per 31 Desember 2014.

Isu tentang sistem pengendalian internal pemerintahan (SPIP) tersebut mendapat perhatian cukup besar belakangan ini. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor eksternal senantiasa menguji “kekuatan” SPI ini di setiap pemeriksaan yang dilakukannya untuk menentukan luas lingkup (scope) pengujian yang akan dilaksanakannya. Beberapa lembaga pemantau (watch) juga mengkritisi lemahnya SPI yang diterapkan di pemerintahan, sehingga membuka peluang yang sangat besar bagi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran (APBN/APBD).

Fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pada Semester II Tahun 2014, BPK melakukan pemeriksaan terhadap 479 objek pemeriksaan di pemerintah daerah dan BUMD. Pemeriksaan tersebut meliputi 69 objek pemeriksaan keuangan 181 objek pemeriksaan kinerja dan 229 objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Hasil pemeriksaan mengungkapkan 5.746 temuan yang di dalamnya terdapat 7.329 permasalahan senilai Rp 4,52 triliun. Permasalahan tersebut meliputi 1.810 kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 5.519 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp 4,52 triliun (Tabel 1).

Selain itu, BPK juga telah memberikan opini atas 68 LKPD TA 2013 dan 1 LKPDAM Tahun 2013. Jumlah kasus tiap-tiap sub kelompok temuan disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1.
Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah dan BUMD

Keterangan	Pemeriksaan Keuangan		Pemeriksaan Kinerja		Pemeriksaan DTT		TOTAL	
	Permasalahan	Nilai (Rp Juta)	Permasalahan	Nilai (Rp Juta)	Permasalahan	Nilai (Rp Juta)	Permasalahan	Nilai (Rp Juta)
Kelemahan SPI								
1 SPI	918	-	71	-	821	-	1,810	-
Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan:								
2 Kerugian	483	286.199,10	19	1.997,96	882	294.598,88	1,384	582.795,94
3 Potensi Kerugian	72	1.294.713,01			324	1.274.467,57	396	2.569.180,58
4 Kekurangan Penerimaan	192	64.564,94	8	7.710,44	365	213.600,93	565	285.876,31
Sub total 1 (Berdampak finansial)	747	1.645.477,05	27	9.708,40	1,571	1.782.667,38	2,345	3.437.852,83
5 Kelemahan administrasi	425	-	1	-	463	-	889	-
6 Ketidakekonomisan	22	33.615,41	18	155.574,64	87	83.830,54	127	273.020,59
7 Ketidakefisienan	-	-	3	-	2	5.251,98	5	5.251,98
8 Ketidakefektifan	13	9.845,55	2,056	560.186,25	84	234.617,75	2,153	804.649,55
Sub total 2	460	43.460,96	2,078	715.760,89	636	323.700,2	3,174	1.082.922,12
Total ketidakpatuhan (Sub total 1 + 2)	1,207	1.688.938,01	2,105	725.469,29	2,207	2.106.367,65	5,519	4.520.774,95
Total Pemerintah Daerah (kelemahan SPI dan Jumlah LHP)	2,125	1.688.938,01	2,176	725.469,29	3,028	2.106.367,65	7,329	4.520.774,95
Jumlah LHP		69		181		229		479
Jumlah Temuan		1,823		1,796		2,127		5,746
Nilai temuan yang sudah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/daerah (dalam		43.022,39		597,81		52.726,08		96.346,28

Sumber :www.bpk.go.id – IHPS II Tahun 2014

Salah satu faktor penentu lainnya yaitu dapat menentukan tinggi rendahnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah Pemahaman Regulasi Sistem Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Definisi pemahaman regulasi adalah pemahaman anggota/pegawai mengenai peraturan, prosedur dan kebijakan tentang peraturan daerah. Peraturan yang dimaksud adalah pedoman yang harus dilakukan

serta prosedur terkait dengan serangkaian strategi untuk mencapai tujuan. Dalam rangka peningkatan kualitas informasi pelaporan keuangan, pemerintah merevisi PP No. 24 Tahun 2005 dengan mengeluarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP yang berbasis akrual. Penerapan akuntansi berbasis akrual diperlukan untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik, serta untuk memfasilitasi manajemen keuangan/aset yang lebih transparan dan akuntabel. Perubahan regulasi akuntansi pemerintah dari basis kas ke basis akrual cukup kompleks sehingga diperlukan pemahaman yang utuh mengenai konsep akuntansi. Jika pemahaman regulasi atas PP 71 tahun 2010 rendah maka kualitas laporan keuangan menjadi rendah. Dasar pemikirannya adalah pemahaman terhadap aturan yang tidak penuh mengindikasikan implementasi aturan cenderung menggunakan insting dibandingkan aturan yang berlaku. Rendahnya keterampilan dasar mengenai pemahaman menjadi salah satu hambatan dalam penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di Fiji (Tickell, 2010). Sehingga, tinggi-rendahnya tingkat pemahaman regulasi akan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang disajikan (Kartikasari, 2012).

Penelitian mengenai pemahaman regulasi masih relatif terbatas dalam artian baru dilakukan oleh Kartikasari (2012), Rahayu (2014), Dora (2014) dan Hariyanto (2012). Akan tetapi, penelitian yang dilakukan belum menggunakan pemahaman regulasi terkait PP 71 tahun 2010 dan belum menguji pemahaman regulasi terhadap kualitas laporan keuangan. Berbeda dari penelitian terdahulu, dalam penelitian ini pemahaman regulasi yang digunakan adalah pemahaman regulasi mengenai PP 71 tahun 2010 yang dikaitkan dengan kualitas laporan yang disusun oleh pemerintah

daerah. Dengan ditetapkannya PP No. 71 Tahun 2010 maka penerapan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum dan penerapan akuntansi pemerintahan mempunyai kewajiban untuk segera menerapkan SAP berbasis akrual. Sumber daya manusia adalah seseorang atau individu yang mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan tugas. Kemampuan sumber daya manusia sangat berperan penting dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dengan hasil laporan yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkaitan langsung dengan sistem akan dituntut untuk memiliki keahlian akuntansi yang cukup memadai atau paling tidak memiliki kemauan untuk terus belajar dan menambah keahlian dibidang akuntansi. Kegagalan yang dialami oleh sumber daya manusia dalam memahami serta menerapkan ilmu akuntansi akan memiliki dampak pada laporan keuangan, seperti adanya kekeliruan laporan yang dibuat dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah, sehingga kualitasnya menjadi buruk (Soimah,2014). Hal ini menunjukkan semakin baik kapasitas sumber daya manusia semakin baik kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan uraian di atas telah dilakukan oleh Nurillah (2014) yang menyatakan bahwa kompetensi SDM, penerapan SAK, pemanfaatan teknologi informasidan sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Roviyantie (2011) menemukan hasil penelitian bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Daerah. Yosefrinaldi (2013) menemukan hasil bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas

laporan keuangan pemerintah daerah. Ariesta (2013), hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan. Delanno dan Deviani (2013), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap nilai pelaporan keuangan daerah. Semakin baik kapasitas sumber daya manusia, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun, Zuliarti (2012) mengungkapkan hal berbeda, yakni sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₁ : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Tujuan sistem pengendalian internal menurut Warren *et al.* (2005) salah satunya adalah untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Dengan sistem akuntansi, risiko terjadinya kekeliruan dan kesalahan pencatatan atau perhitungan dapat diminimalisasi sehingga mengurangi kemungkinan pemerintah daerah mengalami kekeliruan. Suatu sistem yang berkualitas, dirancang, dibangun dan dapat bekerja dengan baik apabila bagian-bagian yang terintegrasi dengan sistem tersebut beroperasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Salah satu bagian di dalam sistem informasi akuntansi yang menunjang kelancaran kerja sistem informasi akuntansi tersebut adalah pengendalian internal (internal control). Masih ditemukannya penyimpangan dan kebocoran di dalam laporan

keuangan oleh BPK, menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah belum memenuhi karakteristik/nilai informasi yang disyaratkan. Hasil audit yang dilakukan oleh BPK, BPK memberikan opini “tidak wajar dan/atau *disclaimer*” diantaranya disebabkan oleh kelemahan sistem pengendalian intern yang dimiliki oleh pemerintah daerah terkait (Badan Pemeriksa Keuangan, 2011 dalam Nurillah, 2014). Menurut Yudianta dan Erawati (2012) pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas informasi akuntansi. Hal ini didukung dengan hasil penelitian Zuliarti (2012) bahwa, pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Delanno dan Deviani (2013), dengan hasil bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah. Desi dan Ertambang (2008) hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa pengendalian intern akuntansi memiliki pengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Yosefrinaldi (2013) menemukan hasil bahwa, sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₂ : Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pemahaman regulasi berkaitan dengan tingkat pemahaman suatu institusi terhadap regulasi yang diterapkan. Penelitian mengenai pemahaman regulasi dilakukan oleh Kartikasari (2012). Hasil pengujiannya menunjukkan bahwa

pemahaman regulasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Pemahaman regulasi terkait dengan penerapan akuntansi basis akrual baru diwajibkan pada tahun 2015 walaupun sudah diundangkan sejak tahun 2010. Alasan penerapan yang cukup lama ini mengindikasikan bahwa masih adanya institusi yang perlu diberikan pelatihan mengenai aturan baru. Pemahaman atas regulasi memegang peran penting dalam kualitas laporan keuangan. Semakin tinggi tingkat pemahaman institusi terhadap regulasi baru maka semakin tinggi kualitas laporan keuangan institusi tersebut. Pemahaman atas regulasi berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan pelaksanaan pelaporan keuangan telah sesuai dengan tujuan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. Institusi sektor publik yang memiliki pemahaman regulasi yang baik mengenai PP 71 2010 akan mudah menyusun laporan keuangan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

H₃ : Pemahaman Atas Regulasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Berdasarkan eksplanasi penelitian, penelitian ini berbentuk penelitian asosiatif dengan tipe kausalitas. Sugiyono (2012 : 6) mengatakan bahwa penelitian yang berbentuk asosiatif dengan tipe kausalitas adalah penelitian yang menjelaskan pengaruh variabel independen pada variabel dependen. Berdasarkan landasan teori dan hipotesis yang disampaikan sebelumnya, penelitian ini dilakukan untuk menguji

sumber daya manusia, system pengendalian intern dan pemahaman atas regulasi system akuntansi pemerintahan berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Raya Sempidi-Mengwi- Badung. Dipilihnya lokasi ini karena dalam laporan keuangannya tidak selalu mendapat opini wajar tanpa pengecualian oleh BPK dan Pusat Pemerintahan Badung sudah menerapkan standar akuntansi berbasis akrual. Obyek penelitian adalah suatu sifat dari obyek yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian diperoleh kesimpulan (Sugiono, 2009:38). Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa obyek penelitian merupakan sumber dan tempat kita memperoleh data. Obyek dari penelitian ini adalah pejabat struktural pada setiap dinas yang ada di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemerintah Kabupaten Badung pada bagian akuntansi/keuangan, dimana pejabat yang dimaksud adalah kepala bidang/kepala bagian serta sekretaris bidang/bagian. Jumlah SKPD di Kabupaten Badung sebanyak 54 SKPD dengan rincian 1 Sekretariat Daerah, 1 Sekretariat DPRD, 1 Inspektorat, 1 BAPPEDA, 15 Dinas, 7 Badan, 3 Kantor, 1 Satuan Polisi Pamong Praja, 1 DPRD, 22 Kantor, 1 Rumah Sakit Umum Daerah.

Variabel terikat adalah Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di SKPD Kabupaten Badung. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yaitu kemampuan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga

laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dilihat dari karakteristik kualitatif laporan keuangan berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami (Soimah,2014). Variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diukur dengan instrumen penelitian (Nurillah, 2014).

Varibel bebas adalah Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_1), Sistem Pengendalian Intern (X_2), dan Pemahaman Atas Regulasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (X_3). Kompetensi menurut Spencer and Spencer, (1993:9) merupakan suatu karakteristik yang mendasari kepribadian seseorang yang menyebabkan saling berkaitan dengan kriteria-keperilakuan efektif dan atau kinerja yang unggul dalam pekerjaan atau situasi tertentu. Sumber daya manusia adalah penyangga untuk dapat mencapai tujuan dari organisasi. Kemampuan sumber daya manusia dalam suatu organisasi atau lembaga dapat dilihat dari pencapaian tujuan dan efektivitas serta efisiensi kinerja yang menghasilkan *outcomes* (Soimah,2014). Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai (Ariesta, 2013). Kompetensi menurut *Guy et al.* (2002) adalah pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Item-item disesuaikan dengan konteks pemerintah daerah. Jumlah item pertanyaan adalah 7 item.

Sistem pengendalian intern pemerintah merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur suatu sumber daya organisasi, serta

berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*). Pemahaman regulasi merupakan pemahaman mengenai peraturan, prosedur, dan kebijakan tentang keuangan daerah. Adanya regulasi tentang keuangan daerah ditujukan untuk membantu anggota dalam melaksanakan perannya dalam hal ini yaitu melakukan pengawasan keuangan daerah. Regulasi ini berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan apakah pelaksanaan keuangan daerah telah sesuai dengan tujuan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan.

Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar atau data yang berupa keterangan-keterangan dan tidak berbentuk angka-angka (Sugiyono, 2013:14). Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah data mengenai gambaran umum, struktur organisasi Kabupaten Badung. Data kuantitatif, merupakan data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2013:13). Data kuantitatif dalam penelitian ini meliputi data jumlah karyawan dan tabulasi hasil kuisioner di SKPD Kabupaten Badung.

Sumber primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik individu maupun kelompok seperti hasil wawancara atau pengisian kuesioner. Data primer mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi (Sekaran, 2006:60). Data primer dalam penelitian ini berasal dari pengisian kuesioner oleh responden. Sumber sekunder, merupakan data yang diolah dan diperoleh oleh peneliti dari pihak perusahaan maupun luar perusahaan yang berkaitan dengan perusahaan yang diteliti. Data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah

ada (Sekaran, 2006:60). Data sekunder dalam penelitian ini adalah jumlah karyawan, sejarah perusahaan serta struktur perusahaan. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/obyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2002). Populasi dalam penelitian ini adalah pengelola unit kerja atau pejabat struktural pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung. Jumlah SKPD di Kabupaten Badung 54 SKPD dengan rincian 1 Sekretariat Daerah, 1 Sekretariat DPRD, 1 Inspektorat, 1 BAPPEDA, 15 Dinas, 7 Badan, 3 Kantor, 1 Satuan Polisi Pamong Praja, 1 DPRD, 22 Kantor, 1 Rumah Sakit Umum Daerah. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *non probability sampling*, yaitu dengan menggunakan pendekatan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah penyampelan dengan kriteria berupa suatu pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2010:122). Sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu sehingga dapat mendukung penelitian ini.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuisisioner, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2013:199). Kuisisioner penelitian ini diserahkan langsung kepada responden atau meminta bantuan salah satu pegawai pada masing-masing SKPD untuk mengkoordinir penyebaran dan pengumpulan kuisisioner pada SKPD tersebut. Pertanyaan-pertanyaan dalam kuisisioner dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok berdasarkan variabel yang diukur. Pengukuran instrumen menggunakan skala Likert

dengan lima alternatif jawaban yang kemudian dimodifikasi menjadi empat alternatif jawaban dengan menghilangkan jawaban bagian tengah. Menurut Hadi dalam Badera (2008), modifikasi skala Likert meniadakan kategori jawaban yang di tengah berdasarkan pertimbangan bahwa, jawaban yang tersedia di tengah akan menimbulkan kecenderungan menjawab ke tengah (*central tendency effect*), terutama bagi responden yang ragu-ragu atas kecenderungan jawaban. Selanjutnya jika disediakan kategori jawaban di tengah, maka data penelitian akan banyak hilang sehingga mengurangi banyaknya informasi yang dapat dijangkau dari responden. Skala *Likert* mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atas sebuah fenomena. (Sugiyono, 2012:132). Jawaban dari setiap pertanyaan mempunyai skor dari sangat setuju sampai sangat sangat tidak setuju dan masing – masing pertanyaan diberi skor untuk kemudahan dalam penelitian.

Analisis regresi linier berganda (*multiple regression*) dilakukan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen (*explanatory*) terhadap satu variabel dependen (Ghozali, 2009). Model regresi berganda dalam pernyataan ini dinyatakan sebagai.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

- Y = kualitas laporan keuangan
 α = konstanta
 β_1 = koefisien regresi kompetensi sumber daya manusia (X_1)
 β_2 = koefisien regresi sistem pengendalian intern (X_2)
 β_3 = koefisien regresi pemahaman atas regulasi sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual (X_3)
 X_1 = variabel kompetensi sumber daya manusia
 X_2 = variabel sistem pengendalian intern
 X_3 = variabel regresi pemahaman atas regulasi sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual
e = error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan program *software SPSS 17.0 for Windows*. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, pemaham atas regulasi sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2.
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,244	1,389		,176	,861
	X1	,400	,085	,305	4,691	,000
	X2	,683	,101	,442	6,758	,000
	X3	,422	,099	,265	4,238	,000
R Square						0,777
F Statistik						120,947
Signifikansi						0,000

Sumber : data primer diolah, 2015

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \dots \dots \dots (2)$$

$$Y = 0,244 + 0,400 X_1 + 0,683 X_2 + 0,422 X_3 + e$$

Keterangan :

- Y = Kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah
- X1 = Kompetensi Sumber Daya Manusia
- X2 = Sistem Pengendalian Intern
- X3 = Pemahaman Atas Regulasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Konstanta sebesar 0,244 menyatakan bahwa tanpa ada pengaruh dari ketiga variabel independen dan faktor lain, maka variabel kualitas laporan keuangan (Y1) pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten Badung adalah 0,244. Koefisien regresi variabel kompetensi SDM 0,400. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi kenaikan kompetensi SDM akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sebesar 0,400 atau sebesar 40 persen tanpa dipengaruhi faktor lainnya. Koefisien regresi pengendalian intern bernilai 0,683. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi kenaikan pengendalian intern akuntansi akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sebesar 0,683 atau sebesar 68,3 persen tanpa dipengaruhi faktor lainnya. Koefisien regresi pemahaman atas regulasi sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual bernilai 0,422. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi kenaikan pengendalian intern akuntansi akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sebesar 0,422 atau sebesar 42,2 persen tanpa dipengaruhi faktor lainnya.

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pada penelitian ini, koefisien determinasi yang digunakan adalah *R Square* yang sudah disesuaikan

atau *Adjusted R²* karena nilai *adjusted R²* dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model. Tabel 3 menunjukkan hasil uji koefisien determinasi (*R²*).

Tabel 3.
Hasil Uji Koefisien Determinasi (*R²*)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1.	0,882 ^a	0,777	0,771	3,13364

Sumber : Data primer diolah, 2015

Berdasarkan hasil uji determinasi diketahui bahwa nilai *adjusted R square* sebesar 0,771, yang mengandung arti bahwa 77,1 persen variasi besarnya kualitas laporan keuangan bisa dijelaskan oleh variasi kompetensi SDM, penerapan sistem akuntansi keuangan, sistem pengendalian intern dan pemahaman atas regulasi sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Sedangkan sisanya 22,9 persen lainnya dijelaskan oleh variabel lain di luar yang diteliti.

Uji F digunakan untuk mengetahui kelayakan dari model regresi linear berganda sebagai alat analisis yang menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila tingkat signifikansi $F \leq \alpha = 0,05$ maka hubungan antar variabel bebas adalah signifikan mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel terikat, sebaliknya jika tingkat signifikansi $F > \alpha = 0,05$ maka hubungan antar variabel bebas adalah tidak signifikan mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel terikat. Tabel 4 menyajikan hasil uji F penelitian.

Tabel 4.
Hasil Uji F

Model	F	Sig.
Regression	120,947	0,000

Sumber: data primer diolah, 2015

Berdasarkan Tabel 4, nilai signifikansi uji F yaitu sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti model yang digunakan pada penelitian ini adalah layak. Hasil ini memberikan makna bahwa ketiga variabel independen mampu memprediksi atau menjelaskan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung tahun 2014-2015.

Nilai t hitung pada variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah sebesar 4,691 dengan tingkat signifikansi 0,000. Dengan menggunakan batas signifikansi 0,05, maka signifikansi tersebut dibawah taraf 5 persen yang berarti nilai H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sehingga kesimpulan yang didapatkan adalah Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Nilai t hitung pada variabel Sistem Pengendalian Intern adalah sebesar 6,758 dengan tingkat signifikansi 0,000. Dengan menggunakan batas signifikansi 0,05, maka signifikansi tersebut dibawah taraf 5 persen yang berarti nilai H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sehingga kesimpulan yang didapatkan adalah Variabel Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Nilai t hitung pada variabel Pemahaman Atas Regulasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI adalah sebesar 4,238 dengan tingkat signifikansi 0,000. Dengan menggunakan batas signifikansi 0,05, maka signifikansi tersebut dibawah taraf 5 persen yang berarti nilai H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sehingga kesimpulan yang didapatkan adalah Variabel Pemahaman Atas Regulasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan Tabel 2, diperoleh nilai koefisien regresi kompetensi SDM sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Nilai signifikansi kompetensi SDM adalah $0,000 < 0,05$, hal ini menunjukkan bahwa kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan kompetensi SDM berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah diterima.

Hasil penelitian ini mendukung secara empirik studi yang dilakukan oleh Nurillah (2014), (Soimah,2014), yang menyimpulkan bahwa kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan/ kualitas laporan keuangan. Kompetensi SDM yang ada di Kabupaten Badung memang tergolong baik. Hal ini bisa dilihat dengan banyaknya pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh pegawai yang berhubungan dengan akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah seperti pelatihan perpajakan, pelatihan bendahara, pelatihan SIMDA keuangan, dan pelatihan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah. Akan tetapi, hasil penelitian

ini tidak sejalan dengan Zuliarti (2012) yang menyimpulkan kompetensi SDM tidak berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan, dalam penelitian ini adalah variabel kualitas laporan keuangan. Berdasarkan Tabel 2, diperoleh nilai koefisien regresi sistem pengendalian intern sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Nilai signifikansi sistem pengendalian intern adalah $0,000 < 0,05$, hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian hipotesis kedua (H_2) yang menyatakan sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah diterima.

Berdasarkan hasil uji hipotesis dinyatakan bahwa pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yudianta dan Erawati (2012), Delano dan Deviani (2013) dan Zuliarti (2012) yang menghasilkan pengendalian intern akuntansi berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan atau dalam hal ini adalah kualitas laporan keuangan. Hal ini memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari kualitas laporan keuangan melalui pengendalian intern akuntansi (Zuliarti, 2012).

Berdasarkan Tabel 2, diperoleh nilai koefisien regresi pemahaman atas regulasi sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman atas regulasi sistem akuntansi pemerintahan

berbasis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Nilai signifikansi pemahaman atas regulasi sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah $0,000 < 0,05$, hal ini menunjukkan bahwa pemahaman atas regulasi sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian hipotesis ketiga (H_3) yang menyatakan pemahaman atas regulasi sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah diterima.

Berdasarkan hasil uji hipotesis dinyatakan bahwa pemahaman atas regulasi sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kartikasari (2012) pemahaman atas regulasi yang menghasilkan berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan atau dalam hal ini adalah kualitas laporan keuangan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan koefisien variabel Sumber Daya Manusia. Hasil penelitian ini menunjukkan semakin tinggi kompetensi Sumber Daya Manusia, maka semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan. Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan koefisien variabel

Sistem Pengendalian Intern. Hasil penelitian ini menunjukkan semakin tinggi penerapan Sistem Pengendalian Intern, maka semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan. Pemahaman Atas Regulasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan koefisien variabel Pemahaman Atas Regulasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI. Hasil penelitian ini menunjukkan semakin tinggi penerapan Pemahaman Atas Regulasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI, maka semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan hasil analisis dan simpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan ialah pelatihan aparatur pemda disarankan agar dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan terlebih khusus jika ada peraturan pemerintah yang terbaru diharapkan secepat mungkin melakukan sosialisasi dengan SKPD yang ada. Pada pertanyaan kuisioner point 5 berada pada tingkat 3,35 atau sangat baik tetapi ini merupakan yang terendah dari indikator kompetensi sumber daya manusia dan ini masih dirasa kurang dari tingkat yang diinginkan organisasi yaitu 4. Untuk itu pemerintah harus memberikan pelatihan-pelatihan sehingga kualitas yang dimiliki pegawai akan tinggi yang tentunya akan berdampak pada kualitas laporan keuangan yang semakin baik dan pegawai mampu memberikan yang terbaik.

Pemda akan menjadi semakin baik jika mempunyai SOP yang baik pula, dengan cara organisasi selalu memperbaiki SOP sesuai dengan perkembangan dan membukukanya ketika ada perubahan untuk menjadikan SOP sebagai alat untuk bekerja dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Pada pertanyaan

kuisisioner point 1 berada pada tingkat 3,48 atau sangat baik tetapi ini merupakan yang terendah dari indikator sistem pengendalian intern dan ini masih dirasa kurang dari tingkat yang diinginkan organisasi yaitu 4. SOP dapat mempermudah melaksanakan tugas dan meminimalisasi kesalahan dalam menjalankan tugas dan memberikan hasil kinerja yang lebih jujur dan baik.

Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara yang penyampaian laporan pertanggung jawaban keuangan Pemerintah yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah. Hal ini harus diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung dengan menggunakan jasa konsultan. Pada pertanyaan kuisisioner point 2 berada pada tingkat 3,35 atau sangat baik tetapi ini merupakan yang terendah dari indikator pemahaman atas regulasi sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan ini masih dirasa kurang dari tingkat yang diinginkan organisasi yaitu 4. Dimana dengan adanya jasa konsultan akan lebih dapat membantu dalam mendampingi proses menjalankan tugas serta menghasilkan kinerja yang transparan dan akuntabel.

Informasi yang disajikan harus tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. Pada pertanyaan kuisisioner point 3 berada pada tingkat 3,38 atau sangat baik tetapi ini merupakan yang terendah dari indikator kualitas laporan keuangan dan ini masih dirasa kurang dari tingkat yang diinginkan organisasi yaitu 4. Dimana informasi yang sajikan tepat waktu akan mempengaruhi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber

daya. Dimana laporan keuangan sebagai sarana mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak eksternal.

REFERENSI

- Ariesta, Fadila. 2013. Pengaruh Kualitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Pasaman Barat). Universitas Negeri Padang.
- Badera, I Dewa Nyoman. 2008. Pengaruh Kesesuaian Hubungan Corporate Governance Dengan Budaya Korporasi Terhadap Kinerja Perusahaan. *Disertasi Doktor Ilmu Ekonomi* Universitas Gadjah Mada.
- Delanno, Galuh Fajar. Deviani. 2013. Pengaruh Kapasitas Sdm, Pemanfaatan TI Dan Pengawasan Keuangan Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi*. Vol.1, No.1.
- Dora, Sofia. 2014. Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua (Studi Kasus Pada BPKD Kota Medan).
- Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 19. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Guy , Dan M., Alderman, C. Wayne dan Winters, Alan J. 2002. *Auditing: Jilid 1*. Jakarta: Erlangga
- Hariyanto, Agus. 2012. Penggunaan Basis Akrua Dalam Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi*. Dharma Ekonomi. No.36
- Husna, Fadhilla. 2013. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengawasan Keuangan, Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Nilai Pelaporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris Pada Skpd Pemerintah Kota Padang Panjang).
- Ihsanti, Emilda. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (*Studi Empiris pada SKPD Kab. Lima Puluh Kota*).
- Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2014*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Melalui <http://www.bpk.go.id>.

- Kartikasari, Dewi. 2012. Pemahaman Regulasi Terhadap Peran Anggota Dprd Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada DPRD Kabupaten Boyolali). *Jurusan Akuntansi*. Universitas Negeri Semarang.
- Nurillah, As Syifa. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok). *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. Vol.1, No.1. Hal: 2337-3806.
- Peraturan Daerah, 2008. Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten badung. Perda Nomor 7 Tahun 2008.
- Peraturan Pemerintah, 2008. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. PP nomor 60 Tahun 2008.
- Rahayu, Sari. 2014. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrual Di Jombang.
- Roviyantie, Devi. 2012. Pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi*. Vol.4, No.1.
- Sekaran, Uma, 2006. Metodologi Penelitian Untuk Bisnis, Jakarta: Salemba Empat.
- Soimah, Siti. 2014. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. *Skripsi*. Universitas Bengkulu.
- Spencer, M. Lyle and Spencer, M. Signe. 1993. *Competence at Work Modelas for Superrior Performance*, John Wily and Son, Inc, New York, USA. pp 19-25
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Tickell, Geoffrey. 2010. Cash To Accrual Accounting: One Nation's Dilemma. *International Business & Economics research Journal*, Vol.9, No.11. Hal 71-78.
- Warren, S. Carl., and Reeve, M. James., and Fess, E. Philip. 2005. *Corporate Financial Accounting*. South Western: Thomson.

- Wati, Kadek desiana. Nyoman Trisna Herawati. Ni Kadek Sinarwati. 2014. Pengaruh Sdm, Penerapan SAP, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi*. Vol.2, No.1. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Winidyaningrum, Celviana. 2009. Pengaruh Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris Di Pemda Subosukawonosraten). Program Studi Magister Akuntansi. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Yosefrinaldi. 2013. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Studi Empiris Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Se-Sumatera Barat). Vol.1,No.1.
- Yudianta, I Gede Agus. Ni Made Adi Erawati. 2012. Pengaruh Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ekonomi*. Universitas Udayana.
- Zuliarti. 2012. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Pada Pemerintah Kabupaten Kudus. Universitas Muria Kudus.